PROSIDING
SEMINAR NASIONAL KE-13
STIP-AN TAHUN 2017
JAKARTA, 20 SEPTEMBER 2017

MEMBANGUN KUALITAS DAN KARAKTER
PEMIMPIN PEMERINTAHAN
SEBAGAI PAMONG BHINNEKA TUNGGAL IKA

STIP-AN BEKERJASAMA DENGAN
HIMPUNAN DOKTOR MANAJEMEN PENDIDIKAN INDONESIA (HIDMAPI)

Website: www.stipan.ac.id E-mail: admin@stipan.ac.id / prosiding.stipan@gmail.com

Kampus : Jl. Lenteng Agung No. 37A, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12610
Telp/Fax: (021) 786 7696, 788 90672, 788 90673
Website: www.stipan.ac.id E-mail: admin@stipan.ac.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
LAPORAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PEMERINTAHAN ABDI NEGARA	v
SAMBUTAN KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ABDI NEGARA NUSANTARA (YPANN).....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DIMENSI KINERJA MODEL KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN SEBAGAI PAMONG BHINNEKA TUNGGAL IKA <i>Oleh : Dr. HM Feisal Tamin</i>	1
MEMBANGUN KUALITAS DAN KARAKTER PEMIMPIN PEMERINTAHAN SEBAGAI PAMONG BHINNEKA TUNGGAL IKA <i>Oleh: Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH., MH., MS</i>	10
STRATEGI MEMBANGUN KUALITAS DAN KARAKTER PEMIMPIN PEMERINTAHAN SEBAGAI PAMONGBHINNEKA TUNGGAL IKA <i>Oleh : Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, M.Si</i>	19
GARIS BESAR DASAR KETERAMPILAN ABDI NEGARA/PEMIMPIN MELAYANI MASYARAKAT Oleh : <i>Dr. KH. Mohammad Idris, MA</i>	31
MODEL KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN SEBAGAI PAMONG BHINNEKA TUNGGAL IKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA, <i>Bibit Santoso</i>	36
GAYA KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN JOKO WIDODO YANG BERKARAKTER SEBAGAI PAMONG BHINNEKA TUNGGAL IKA, <i>Amalia Syauket</i>	54
KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN SEBAGAI PAMONG BHINNEKA TUNGGAL IKA DENGAN PENDEKATAN SILATURAHMI JUNGJANG KARAWAT <i>Sofyan Safari Hamim</i>	65
IMPLIKASI DAN KONSEKWENSI NILAI-NILAI LOCAL WISDOM (KEARIFAN LOKAL) DALAM KEPEMIMPINAN DAERAH, <i>Rahadi Budi Prayitno</i>	76
KEPEMIMPINAN BERKUALITAS DALAM MEMIMPIN KEBHINNEKAAN TUNGGAL IKA, <i>Afriadi S. Hasibuan</i>	92
PEMERINTAHAN DEMOKRASI MENUNGGU MUNCULNYA PAMONG BHINEKA TUNGGAL IKA, <i>Khaidar Azmi</i>	103
GARIS BESAR DASAR KETERAMPILAN ABDI NEGARA/PEMIMPIN MELAYANI MASYARAKAT, <i>Dedi Setiadi</i>	123
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL YANG MELAYANI DALAM KEBHINEKAAN, <i>R. Ervin Agung Priambodo</i>	137
MEMBANGUN KEPEMIMPINAN DAN PEMERINTAHAN "PANCASILA", <i>Andi Azikin</i>	155

REFRAMING ETHICS AND SPIRIT IN LEADERSHIP, <i>Ruben Nesimnasi , Ronne AY Teintang , Claartje S.E Awulle</i>	392
PANCASILA SEBAGAI JIWA PANDANGAN HIDUP SERTA PEMERSATU KEBERAGAMAN HIDUP BANGSA INDONESIA <i>Tonahati, Lasino dan Limunada Umbase</i>	402
PERAN KELUARGA, SEKOLAH, DAN MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN BUDAYA KONTEKS KEINDONESIAN MERAWAT KEBHINNEKAAN <i>Yan Kristianus Kadang</i>	414
AKUNTABILITAS PEMERINTAH KELURAHAN DALAM MENSUKSESKAN PROGRAM "MAKASSARTA' TIDAK RANTASA" DI KELURAHAN MELAYU KOTA MAKASSAR, <i>Ariani , Muhammadiyah , Musliha Karim</i>	430
KEPEMIMPINAN GAYA JONAN, <i>Ratna Indriasari¹, Susi Dahlia²</i>	443
MEMBANGUN KUALITAS DAN KARAKTER PEMIMPIN YANG DIPERCAYA MASYARAKAT, <i>Ahmad Kosasih</i>	459
PEMIMPIN YANG AMANAH, <i>Ahmad Kosasih dan Catur Widiatmoko</i>	472
PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI UNIVERSITAS ISLAM'45' BEKASI <i>Diyah Yuli Sugiarti</i>	486
EFEKTIVITAS PROGRAM MAKASSAR TIDAK RANTASA (MTR) TERHADAP KESADARAN KEBERSIHAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR), <i>Risfaisal</i>	502
KONVERSI LAHAN (STUDI KASUS PABRIK SEMEN PT. CONCH MASYARAKAT KABUPATEN BARRU), <i>Risfaisal , Lukman Ismail</i>	514
KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD DALAM FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN DI KABUPATEN GOWA, <i>Risna Ramdhani Hasan , Muhlis Madani , Muhammad Tahir</i>	527
THE IMPLEMENTATION OF DECENTRALIZATION OF EDUCATION IN INDONESIA, <i>Baharuddin Iskandar Ahmad</i>	538
STRATEGI MEMBANGUN KUALITAS DAN KARAKTER PEMIMPIN PEMERINTAHAN SEBAGAI PAMONG BHINNEKA TUNGGAL IKA, <i>Masni Rani</i>	551
IMPROVEMENT OF VISIONARY LEADERSHIP FOR THE HEADMASTERS OF PRIVATE MADRASAH ALIYAH (PENINGKATAN KEPEMIMPINAN VISIONER KEPALA MADRASAH ALIYAH SWASTA), <i>Diyah Yuli Sugiarti</i>	558
MENYIAPKAN CALON PEMIMPIN INDONESIA YANG MEMILIKI SIKAP KEBHINNEKAAN, <i>Hj. Miftachul Hidayah</i>	570

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD DALAM FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN DI KABUPATEN GOWA

Risna Ramdhani Hasan¹, Muhlis Madani², Muhammad Tahir³

Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar¹

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar²

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar³

Email : afinyeyen@yahoo.co.id

ABSTRACT

The aim of this research is to know realization to coordinate between governments with DPRD in formulation budget of policy with also a responsibility, a administration procedure and relation hierarchy. This research is categorized in qualitative descriptive and the type of research is phenomenology. The number of the informants are 11 people. The data collection techniques are depth interviews, observation, focus and documents. While the qualitative data analysis is carried out systematically that data reduction, data presentation, verification and conclusion. The results of the research showed that the implementation of the coordination between Governments with DPRD in formulation budget of policy in Gowa district still need to consider several aspects such as communication, awareness of the importance of coordination, the competence of the participants, agreements and commitments.

Keywords: *coordination, governments, policy of formulation.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam merumuskan kebijakan anggaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan perumusan tugas, tanggung jawab, prosedur tata kerja dan hubungan hierarkis. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tipe penelitian fenomenologi. Informan penelitian berjumlah 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, terfokus dan dokumen. Sementara analisa data secara kualitatif dilakukan secara sistematis yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam memformulasikan kebijakan anggaran di Kabupaten Gowa masih perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen.

Kata Kunci: *koordinasi, pemerintah daerah, formulasi kebijakan*

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah yang memiliki hak otonom mempunyai keleluasaan yang lebih banyak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pembangunan bisa mengarah pada pengelolaan secara *bottom up*. Dengan demikian, Pemerintah Daerah bukan lagi sekedar operator pembangunan, tetapi juga sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator dan stimulator.

Reposisi politik anggota DPRD di era reformasi ini menjadi kenyataan di hampir semua daerah. Posisi politik DPRD yang strategis ini hendaknya diperankan secara maksimal dalam fungsi pengawasan kinerja eksekutif, legislasi demokratis serta menciptakan ruang partisipasi politik warga dalam mengelola daerahnya.

Organisasi dalam bentuk apapun esensinya terdiri dari sumber daya, proses manajemen dan tujuan organisasi. Seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut dimanfaatkan dalam proses manajemen secara terintegrasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Proses integrasi sumber daya maupun proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tersebut disebut dengan proses koordinasi. Dengan demikian, koordinasi memiliki peran yang vital dalam memadukan seluruh sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan.

Semakin kompleks organisasi dan manajemen maka semakin kompleks juga proses koordinasi yang harus dilakukan. Bahkan, dalam konteks organisasi swasta (*private institutions*), koordinasi tidak hanya dilakukan dalam ruang lingkup satu negara tetapi juga lintas negara sebagaimana telah banyak dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan multi-nasional. Dapat dibayangkan, betapa sulitnya proses manajemen sumber daya yang tersebar di berbagai negara tanpa adanya koordinasi. Tanpa koordinasi maka sumber daya yang tersebar tersebut tidak dapat dikelola secara efektif dan efisien. Prinsip koordinasi juga harus terefleksikan dalam organisasi.

Publik atau pemerintahan maupun organisasi kesewadayaan masyarakat. Dalam organisasi publik, sumber daya yang digunakan tidak sedikit.

Sesuai dengan praktek administrasi negara di Indonesia seringkali koordinasi dianggap sebagai "barang mahal". Koordinasi mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Banyak sekali instansi yang memiliki kegiatan sejenis namun tidak terkoordinasi dengan baik. Masalah ini juga terjadi dalam hubungan antar unit dalam organisasi. Beberapa unit dalam satu organisasi memiliki kegiatan serupa tanpa bisa dikendalikan oleh pimpinan. Kondisi ini dapat semakin parah apabila tidak dikoordinasikan

dari semenjak perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi.

Secara umum, koordinasi merupakan "tali pengikat" dalam organisasi dan manajemen yang menghubungkan peran para aktor dalam organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan manajemen. Dengan kata lain, adanya koordinasi dapat menjamin pergerakan aktor organisasi ke arah tujuan bersama. Tanpa adanya koordinasi, semua pihak dalam organisasi dan manajemen akan bergerak sesuai dengan kepentingannya namun terlepas dari peran aktor lainnya dalam organisasi dan peran masing-masing aktor tersebut belum tentu untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, koordinasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam formulasi kebijakan anggaran di Kabupaten Gowa masih kurang, ini disebabkan karena pada setiap rapat dalam BANGGAR (Badan Anggaran) kurang menanggapi setiap masukan yang ada. Sehingga terkadang masyarakat tidak mengetahui bagaimana hasil dari rapat tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Madani (2011:104), memperlihatkan bahwa interaksi antara aktor dalam kerangka perumusan kebijakan APBD sesungguhnya telah terjalin meskipun dalam bentuk dan modusnya yang lain.

Menurut Terry dalam Hasibuan (2006:85), berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam pada sasaran yang telah ditentukan.

Lebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh Madani (2011:155) di Kota Makassar terkait konflik yang terjadi dalam formulasi anggaran antara DPRD dengan pemerintah Daerah terutama dalam tahapan pembahasan anggaran dan besaran anggaran yang diajukan. Temuan ini relevan dengan analisis Yudoyono dalam Madani (2011:155) dalam hal: (1) penyusunan APBD, terutama pada pos anggaran belanja untuk DPRD; (2) kedudukan keuangan DPRD terhadap PAD; (3) kedudukan protokoler anggota DPRD beserta fasilitas-fasilitasnya; (4) pembahasan laporan pertanggung jawaban tahunan kepala daerah.

Menurut Uchjana (1993:18), Koordinasi berasal dari bahasa Inggris *coordination* bersumber dari perkataan latin *coordination* yang berarti kombinasi atau interaksi yang harmonis (*harmonious combination on interaction*). Sedangkan menurut Moekijat (1994:2), bahwa koordinasi adalah penyelarasan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama.

Andini dkk (2010), mengemukakan bahwa Koordinasi didefinisikan sebagai proses peng-integrasian (penyatuan) tujuan dan kegiatan perusahaan pada satuan yang terpisah

dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi dibutuhkan sekali oleh para karyawan, sebab tanpa koordinasi setiap karyawan tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi itu sendiri.

Solihin (2009:91), karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya per-seorangan.

Jones (1996:149), menerangkan bahwa formulasi merupakan turunan dari formula yang berarti untuk pengembangan metode, rencana untuk tindakan dalam suatu masalah. Ini merupakan permulaan dari kebijakan pengembangan fase atau tahap dalam kebijakan publik.

Menurut Rusli (2013:30), kebijakan atau yang sering dipersamakan maknanya dengan kata *policy* adalah sebuah kata yang dalam implikasinya bisa digunakan secara luas (makro) atau sempit (mikro).

Tjokroamidjojo dalam Islamy (1991:24), mengatakan bahwa *policy formulation* sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. Menurut Winarno (2004:91-92), Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Suhady dalam Tjandra (2009:197), Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, Kota dan sebagainya. Sedangkan menurut Misdyanti dan Kartasapoetra (1993:17), Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintah di daerah, dengan kata lain pemerintah daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah di daerah.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama dua bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian dilaksanakan di dua tempat yaitu di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan di Kantor DPRD Kabupaten Gowa dengan tujuan untuk melihat sejauh mana koordinasi yang dilakukan oleh DPKAD Kabupaten Gowa selaku perwakilan dari pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Gowa dalam formulasi kebijakan anggaran.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi untuk memberi gambaran secara jelas berdasarkan masalah yang diteliti.

Data bersumber dari data primer dan sekunder. Dengan informan berjumlah sebelas orang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan data dianalisis berdasarkan tiga komponen menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2012: 92 yaitu: *Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing or Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD kabupaten Gowa khususnya dalam formulasi kebijakan anggaran harus dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan dan terciptanya suatu pemahaman yang sama baik oleh Pemerintah Daerah selaku eksekutor dari kebijakan tersebut maupun DPRD selaku pembuat kebijakan (legislasi). Dalam melakukan koordinasi terkait formulasi kebijakan anggaran, maka pemerintah daerah dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) dan BAPPEDA Kabupaten Gowa harus memahami tugas dan fungsinya untuk kemudian melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kabupaten Gowa terkait formulasi kebijakan anggaran yang akan di bahas.

Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Gowa dapat diartikan sebagai penyampaian ide dan pemikiran yang dituangkan ke dalam sebuah pesan baik dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Gowa maupun sebaliknya terkait formulasi kebijakan anggaran yang akan di bahas. Hal ini merupakan salah satu proses penting/vital dalam formulasi kebijakan anggaran sebagai upaya meminimalisir berbagai kesalahan dalam penerimaan maksud dan tujuan pesan yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Komunikasi yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Gowa memang sangat sederhana dan mudah

dipahami, tetapi dalam pelaksanaannya sangat sulit dipahami, terlebih lagi bila yang terlibat komunikasi memiliki referensi yang berbeda, atau di dalam komunikasi berjalan satu arah saja.

Pemberian informasi dapat diartikan sebagai pemberian sejumlah data-data yang telah di olah menjadi suatu informasi yang dapat berguna dan bermanfaat baik bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gowa terkait masalah pelaksanaan koordinasi dalam formulasi kebijakan anggaran di kabupaten Gowa. Pemberian informasi secara timbal balik sangat penting, hal ini disebabkan karena informasi tersebut akan dijadikan sebagai sebuah ukuran dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan selanjutnya.

Informasi yang masuk tersebut berasal dari Bupati Gowa berdasarkan aturan-aturan yang telah ada utamanya peraturan yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri untuk kemudian ditindak lanjuti melalui peraturan Bupati tentang rencana pembangunan jangka menengah. Ditambahkan oleh informan, bahwa informasi tersebut kemudian dibahas secara bersama-sama oleh anggota DPRD kabupaten Gowa dalam pembahasan formulasi kebijakan anggaran.

Konsep ini kemudian di bahas secara bersama dengan anggota DPRD untuk melahirkan sebuah kebijakan anggaran yang disepakati dan sesuai dengan porsi anggaran yang tersedia. Pemberian informasi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dengan DPRD kabupaten Gowa sebelum melakukan suatu pembahasan terkait formulasi kebijakan anggaran di kabupaten Gowa.

Penggunaan teknologi informasi sangat berperan dalam penyebaran informasi yang dapat didapatkan secara mudah dan cepat tanpa harus menunggu waktu yang lama. Penggunaan teknologi informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai ada tidaknya teknologi informasi dalam komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam memformulasikan kebijakan anggaran di kabupaten Gowa.

Pemerintah daerah dalam hal ini diwakilkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Gowa senantiasa memanfaatkan dan menggunakan sarana teknologi dan informasi yang tersedia dalam upayanya melakukan komunikasi dengan DPRD. Salah satu penggunaan teknologi yang sering dimanfaatkan adalah melalui via e-mail maupun handphone dalam memberikan atau mengirim informasi kepada DPRD terkait anggaran pembangunan daerah yang akan dibahas secara bersama-sama begitupun sebaliknya DPKAD kabupaten Gowa menggunakan alat teknologi tersebut dalam menerima pesan atau informasi yang terkait dengan pembahasan anggaran dari DPRD Kabupaten Gowa.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah dalam hal ini diwakilkan

oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Gowa dengan DPRD dalam melakukan koordinasi terkait formulasi kebijakan anggaran di kabupaten Gowa belum dilakukan secara optimal dan efektif. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu: (1) Fasilitas teknologi informasi yang digunakan masih terbatas baik ketersediaan perangkat keras maupun alat-alat lain yang menunjang pengolahan data; (2) Kemampuan aparat pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu, komunikasi yang sering dilakukan dalam hubungannya dengan koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD masih sering dilakukan melalui tatap muka maupun penyebaran informasi melalui *handphone*.

Kesadaran akan pentingnya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan DPRD terkait formulasi kebijakan anggaran di Kabupaten Gowa memiliki tujuan untuk menciptakan dan memelihara efektivitas dari suatu rencana program yang akan dibahas. Selain hal tersebut, koordinasi yang dilakukan harus dapat menciptakan efisiensi setinggi-tingginya pada setiap kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda melalui kesepakatan-kesepakatan yang mengikat semua pihak baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD kabupaten Gowa.

Tingkat pengetahuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana pemahaman dari pemerintah daerah dan DPRD akan pentingnya untuk saling berkoordinasi dalam melakukan formulasi kebijakan anggaran sehingga informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran sesuai dengan kesepakatan bersama.

tingkat pengetahuan pemerintah daerah dalam hal ini aparat di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Gowa dan DPRD sangat berperan penting dalam upayanya mewujudkan sistem koordinasi yang efektif dan efisien antara kedua belah pihak khususnya dalam memformulasikan sebuah kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan pagu anggaran yang ada.

Ketaatan dapat diartikan sebagai suka menurut, taat pada perintah, maupun aturan-aturan yang telah disepakati. Tingkat ketaatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Gowa dalam melaksanakan hasil koordinasi yang dilakukan dalam memformulasikan kebijakan anggaran.

Ketaatan aparat Pemerintah dengan DPRD pada hasil koordinasi dalam memformulasikan kebijakan anggaran di kabupaten Gowa sudah cukup baik. Dimana pemerintah selaku eksekutor kebijakan mampu menjalankan isi kebijakan tersebut dengan baik, dengan ditunjang adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dan Komisi Teknis DPRD Kabupaten Gowa. Sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat berjalan sesuai dengan isi dan maksud yang tertera dalam peraturan daerah yang ada dalam rangka mencapai tujuannya.

Kompetensi partisipan yang dimaksud di sini adalah adanya keterlibatan antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam mem-formulasikan kebijakan anggaran yang dapat dilihat berdasarkan ada tidaknya pejabat berwenang yang terlibat dari pihak pemerintah daerah maupun DPRD saat koordinasi dalam memformulasikan kebijakan anggaran serta ada tidaknya ahli yang terlibat dari pemerintah daerah maupun DPRD saat koordinasi dalam memformulasikan kebijakan anggaran tersebut.

Keterlibatan pejabat yang berwenang baik dari pemerintah daerah maupun DPRD kabupaten Gowa yang dianggap memiliki tingkat kemampuan dan pemahaman untuk melakukan komunikasi secara baik dan terarah. Pejabat berwenang yang dimaksud adalah perwakilan dari pemerintah daerah seperti Bupati, Sekertaris Daerah maupun pejabat SKPD yang merupakan bagian dari tugasnya sedangkan untuk DPRD seperti Ketua, Wakil Ketua, maupun anggota masing-masing komisi.

Pembahasan kebijakan anggaran yang akan digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gowa setidaknya harus mendapatkan persetujuan dari DPRD selaku mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program atau kegiatan masing-masing Dinas atau instansi atau Badan pemerintah. Dalam arti bahwa koordinasi harus senantiasa berjalan secara baik dan searah (Pemerintah Daerah dengan DPRD) agar segala bentuk kegiatan atau program dari pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dihadapan DPRD dan masyarakat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi diantaranya perumusan tugas, tanggung jawab, prosedur tata kerja dan hubungan hierarkis yang terjadi. Oleh karena itu, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki pemahaman dan tingkat kemampuan yang memadai dalam melaksanakan setiap program-program kerjanya berdasarkan pada kebijakan dan peraturan daerah yang ada. Demikian halnya DPRD kabupaten Gowa sebagai mitra kerja dari pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjalankan tugas kontrol terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah dan penggunaan anggaran yang dikeluarkan pada setiap program-program pemerintah.

Perumusan tugas yang dimaksud disini adalah sejauh mana pemerintah daerah dalam hal ini adalah masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perumusan tugas biasanya dicerminkan melalui tupoksi masing-masing SKPD yang ada. Dalam kaitannya dengan pembahasan anggaran, maka tupoksinya berada di dua tempat, pertama tupoksi yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPKAD) dan BAPPEDA.

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai wujud kesadaran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Gowa akan tugas dan fungsinya untuk saling melakukan koordinasi terkait formulasi kebijakan anggaran. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan koordinasi lebih ditekankan kepada pelaksanaan program dan penggunaan anggaran dari masing-masing unit-unit kerja, dalam pelaksanaan koordinasi terkait formulasi kebijakan anggaran di kabupaten Gowa sudah cukup baik.

Hal ini dapat terlihat dari beberapa pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing seperti penginputan dan pengiriman data-data Perda APBD (IKD) berbasis teknologi informasi melalui database yang ada secara cepat, akurat, relevan dan tepat waktu. Hal lain dari adanya wujud tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari adanya konsistensi pemerintah daerah dan DPRD untuk melaksanakan hasil kesepakatan anggaran sampai kepada penggunaan anggaran oleh masing-masing satuan kerja/unit kerja pemerintah daerah.

Prosedur dapat diartikan sebagai tahapan dalam tata kerja tentang bagaimana mengelola sebuah pe-kerjaan, yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan sedangkan tata kerja yang dimaksud adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien, prosedur dan tata kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD kabupaten Gowa sudah cukup baik dan telah sesuai dengan aturan yang ada.

Hubungan Hierarkis dapat diartikan sebagai urutan tingkatan atau jenjang jabatan (Pangkat Kedudukan) dari tingkat wewenang yang paling bawah sampai kepada tingkat wewenang yang paling atas. Hubungan hierarkis yang terjadi pada masing-masing SKPD pemerintah Kabupaten Gowa berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas, kejelasan pengkoordinasian, dan keterkaitan tugas dan garis komando dari masing-masing bidang dan staf.

Sesuai dengan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa hubungan hierarkis yang terjadi pada BAPPEDA Kabupaten Gowa yang dimaksud oleh informan adalah adanya kejelasan arah koordinasi dari masing-masing bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Setiap pegawai harus mengetahui kepada siapa mereka mengkoordinasikan rencana dan hasil kegiatan mereka. Ditambahkan oleh informan bahwa hubungan hierarkis ini dapat dilihat dari tingkatan jabatan dan pelaksanaan tupoksi masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang ini, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

(1) Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam memformulasikan kebijakan anggaran dapat dilihat dari empat aspek, yakni: (a) Aspek Komunikasi dalam hal ini terdiri dari pemberian informasi masih berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari tahapan-tahapan yang harus dilalui secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, hanya saja dalam hal penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi pada aspek komunikasi belum dilakukan secara optimal dan efektif; (b) Aspek kesadaran berkoordinasi diterapkan dengan baik dan sesuai baik dari segi tingkat pengetahuan maupun tingkat ketaatannya; (c) Aspek kompetensi partisipan sudah berjalan dengan baik dan searah; (d) Aspek kesepakatan dan komitmen yang dibangun antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam memformulasikan kebijakan. (2) Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam formulasi kebijakan anggaran, yaitu: (a) Perumusan tugas Pemerintah Daerah yang tercermin dari adanya tupoksi khususnya pada DPKAD dan BAPPEDA Kabupaten Gowa sudah cukup baik; (b) Tingkat Tanggung Jawab antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam pelaksanaan koordinasi terkait formulasi kebijakan sudah cukup baik.; (c) Prosedur dan Tata Kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sudah sesuai dengan aturan yang ada serta memiliki payung hukum; dan (d) Adanya hubungan hierarkis yang terjadi pada masing-masing SKPD pemerintah Kabupaten Gowa berjalan dengan cukup baik.

REFERENSI

- Andini Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Madani, Muhlis. 2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemda dalam Pembuatan Perda*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moekijat. 1994. *Pengembangan Manajemen dan Motivasi*. Yogyakarta: Lintang Pustaka.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

- Tjandra, Riawan W. 2009. *Peningkatan Kapasitas Pemda dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Uchjana, Effendy Onong. 1993. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Winarno, Budi. 2004. *Kebijakan Publik. Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.